

## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Selatan No. 26 Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Email : admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id Website : https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id Fax. (0567) 21027 Kode Pos 78715

LEMBAR DISPOSISI	
Surat Dari : BCN Diterima Tangg No. Surat : 679/8-51.000/ Tgl. Surat : 49/8-9-35	
Perihal : andangan Poeufek.	
Diteruskan Kepada Sdr:	Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/Konfirmasikan
Catatan:  Al Cestrid iprole  y clear gins drus Cord Cerupinus gadeval  (29 27 - honoga lean senin) te y 29/1	



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Jakarta, 25 September 2025

Nomor

: 678/B-SI.02.01/UE/E.V/2025

Sifat

: Biasa

Lampiran: -

Hal

: Undangan BIMTEK IDIS 3.0

Yth. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota (Daftar Terlampir)

di tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan data kepegawaian serta mendukung implementasi Integrated Discipline (IDIS 3.0), bersama ini kami mohon Bapak/Ibu untuk dapat menugaskan pejabat/pegawai terkait pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) IDIS 3.0 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal

: Selasa, 29 September 2025

Waktu

: 13:30 WIB s.d selesai

Link zoom

: https://zoom.us/j/98835246908?pwd=zTGHpgiabF8xQm

I0BCdZag2I2nQPSh.1

Meeting ID: 988 3524 6908

Passcode: 084806

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teknis serta kesamaan persepsi dalam mendukung penegakan disiplin ASN yang terintegrasi melalui platform IDIS 3.0. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

> Sekretaris Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN



Ditandatangani Secara Elektronik,

## Tembusan:

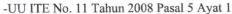
- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN; dan
- 2. Plt. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN.



Tanggal: 25 September 2025

## Daftar Undangan

- 1. Pemerintah Kab. Pelalawan
- 2. Pemerintah Kab. Cilacap
- 3. Pemerintah Kab. Rejang Lebong
- 4. Pemerintah Kota Surabaya
- 5. Pemerintah Kab. Kulon Progo
- 6. Pemerintah Kab. Serang
- 7. Pemerintah Kab. Malang
- 8. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
- 9. Pemerintah Kab. Temanggung
- 10. Pemerintah Kab. Lampung Timur
- 11. Pemerintah Kab. Ciamis
- 12. Pemerintah Kab. Banyumas
- 13. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
- 14. Pemerintah Kota Batu
- 15. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 16. Pemerintah Kab. Bojonegoro
- 17. Pemerintah Kab. Bungo
- 18. Pemerintah Kab. Madiun
- 19. Pemerintah Kab. Pesisir Barat
- 20. Pemerintah Kab. Purbalingga
- 21. Pemerintah Kota Subulussalam
- 22. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- 23. Pemerintah Kab. Semarang
- 24. Pemerintah Kab. Sarolangun
- 25. Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
- 26. Pemerintah Kota Bandar Lampung
- 27. Pemerintah Kab. Lingga
- 28. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- 29. Pemerintah Kab. Batang
- 30. Pemerintah Kab. Sumedang
- 31. Pemerintah Kota Tanjungpinang
- 32. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 33. Pemerintah Kota Lhokseumawe
- 34. Pemerintah Kab. Bogor
- 35. Pemerintah Kab. Kaur
- 36. Pemerintah Provinsi Riau
- 37. Pemerintah Kab. Tulungagung
- 38. Pemerintah Kab. Bangkalan
- 39. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 40. Pemerintah Kota Batam
- 41. Pemerintah Kab. Bintan
- 42. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
- 43. Pemerintah Kab. Sragen
- 44. Pemerintah Kab. Karimun
- 45. Pemerintah Kab. Pati
- 46. Pemerintah Kab. Gresik
- 47. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
- 48. Pemerintah Kab. Rembang
- 49. Pemerintah Kab. Sijunjung



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah." -Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Lampiran Undangan Eksternal

Nomor: 678/B-SI.02.01/UE/E.V/2025

- 50. Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
- 51. Pemerintah Kab. Solok Selatan
- 52. Pemerintah Kab. Pandeglang
- 53. Pemerintah Provinsi Lampung
- 54. Pemerintah Kab. Purwakarta
- 55. Pemerintah Kab. Gayo Lues
- 56. Pemerintah Kab. Lumajang
- 57. Pemerintah Kota Salatiga
- 58. Pemerintah Kab. Mempawah
- 59. Pemerintah Kab. Way Kanan
- 60. Pemerintah Kota Cimahi
- 61. Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
- 62. Pemerintah Kota Bekasi
- 63. Pemerintah Kota Padang
- 64. Pemerintah Provinsi Banten
- 65. Pemerintah Kab. Lebak
- 66. Pemerintah Kota Bandung
- 67. Pemerintah Kab. Batang Hari
- 68. Pemerintah Kab. Cirebon
- 69. Pemerintah Kota Tasikmalaya
- 70. Pemerintah Kab. Majalengka
- 71. Pemerintah Kota Sukabumi
- 72. Pemerintah Kab. Demak
- 73. Pemerintah Kab. Wonosobo
- 74. Pemerintah Kab. Purworejo
- Pemerintah Kab. Lamongan
- 76. Pemerintah Kab. Ponorogo
- 77. Pemerintah Kab. Ngawi
- 78. Pemerintah Kota Surakarta
- 79. Pemerintah Kota Malang
- 80. Pemerintah Kab. Pidie Jaya
- 81. Pemerintah Kab. Aceh Timur
- 82. Pemerintah Kab. Bangka
- 83. Pemerintah Kab. Kayong Utara
- 84. Pemerintah Kota Pontianak
- 85. Pemerintah Kab. Ketapang
- 86. Pemerintah Kab. Nagan Raya
- 87. Pemerintah Kab. Subang
- 88. Pemerintah Kab. Aceh Besar
- 89. Pemerintah Kab. Karawang
- 90. Pemerintah Provinsi Jambi
- 91. Pemerintah Kab. Lebong
- 92. Pemerintah Kab. Blitar
- 93. Pemerintah Kab. Bireuen
- 94. Pemerintah Kab. Pidie
- 95. Pemerintah Kab. Jombang
- 96. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
- 97. Pemerintah Kab. Seluma
- 98. Pemerintah Kab. Bekasi
- 99. Pemerintah Kab. Kepahiang
- 100. Pemerintah Kab. Indramayu
- 101. Pemerintah Kab. Tasikmalaya
- 102. Pemerintah Kab. Aceh Selatan



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah." -Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Lampiran Undangan Eksternal

Nomor: 678/B-SI.02.01/UE/E.V/2025

- 103. Pemerintah Kota Bengkulu
- 104. Pemerintah Kab. Pasaman
- 105. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
- 106. Pemerintah Kota Langsa
- 107. Pemerintah Kab. Mukomuko
- 108. Pemerintah Kab. Lampung Tengah
- 109. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
- 110. Pemerintah Kab. Lampung Barat
- 111. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
- 112. Pemerintah Kab. Solok
- 113. Pemerintah Kab. Rokan Hilir
- 114. Pemerintah Kota Padang Panjang
- 115. Pemerintah Kab. Grobogan
- 116. Pemerintah Kab. Bandung
- 117. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- 118. Pemerintah Kota Bukittinggi
- 119. Pemerintah Kab. Probolinggo
- 120. Pemerintah Kab. Kediri
- 121. Pemerintah Kab. Garut
- 122. Pemerintah Kota Pagar Alam
- 123. Pemerintah Kab. Tebo
- 124. Pemerintah Kab. Belitung
- 125. Pemerintah Kab. Musi Rawas
- 126. Pemerintah Kota Prabumulih
- 127. Pemerintah Kab. Natuna
- 128. Pemerintah Kab. Sumenep
- 129. Pemerintah Kab. Empat Lawang
- 130. Pemerintah Kab. Banyuwangi
- 131. Pemerintah Kab. Sekadau
- 132. Pemerintah Kab. Bener Meriah
- 133. Pemerintah Kab. Dharmasraya
- 134. Pemerintah Kab. Kubu Raya
- 135. Pemerintah Kab. Melawi
- 136. Pemerintah Kab. Bantul
- 137. Pemerintah Kab. Kudus
- 138. Pemerintah Kota Yogyakarta
- 139. Pemerintah Kota Cilegon
- 140. Pemerintah Kab. Blora
- 141. Pemerintah Kab. Klaten
- 142. Pemerintah Kab. Brebes
- 143. Pemerintah Kab. Banjarnegara
- 144. Pemerintah Kab. Bengkalis
- 145. Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
- 146. Pemerintah Kota Banjar
- 147. Pemerintah Kab. Lahat
- 148. Pemerintah Kab. Agam
- 149. Pemerintah Kab. Siak
- 150. Pemerintah Kab. Jember
- 151. Pemerintah Kab. Boyolali
- 152. Pemerintah Kota Tegal
- 153. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
- 154. Pemerintah Kab. Pasuruan
- 155. Pemerintah Kota Jambi



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah." -Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



- 156. Pemerintah Kota Palembang
- 157. Pemerintah Kab. Situbondo
- 158. Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
- 159. Pemerintah Kab. Muara Enim
- 160. Pemerintah Kab. Merangin
- 161. Pemerintah Kab. Padang Pariaman
- 162. Pemerintah Kota Magelang
- 163. Pemerintah Kota Pekalongan
- 164. Pemerintah Kab. Belitung Timur
- 165. Pemerintah Kota Payakumbuh
- 166. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
- 167. Pemerintah Kab. Wonogiri
- 168. Pemerintah Kota Mojokerto
- 169. Pemerintah Kota Blitar
- 170. Pemerintah Kota Madiun
- 171. Pemerintah Kota Solok
- 172. Pemerintah Kab. Sambas
- 173. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
- 174. Pemerintah Kab. Bengkayang
- 175. Pemerintah Kab. Magetan
- 176. Pemerintah Kab. Tuban
- 177. Pemerintah Kab. Karanganyar
- 178. Pemerintah Kota Singkawang
- 179. Pemerintah Kab. Landak
- 180. Pemerintah Kab. Sleman
- 181. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
- 182. Pemerintah Kab. Tanggamus
- 183. Pemerintah Kota Probolinggo
- 184. Pemerintah Kab. Cianjur
- 185. Pemerintah Kab. Sukabumi
- 186. Pemerintah Kota Metro
- 187. Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
- 188. Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
- 189. Pemerintah Kab. Bangka Barat
- 190. Pemerintah Kota Banda Aceh
- 191. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
- 192. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
- 193. Pemerintah Kab. Trenggalek
- 194. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
- 195. Pemerintah Kab. Aceh Barat
- 196. Pemerintah Kota Serang
- 197. Pemerintah Kab. Banyuasin
- 198. Pemerintah Kota Dumai
- 199. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
- 200. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
- 201. Pemerintah Kota Sabang
- 202. Pemerintah Kab. Kebumen
- 203. Pemerintah Kab. Kuningan
- 204. Pemerintah Kota Pariaman
- 205. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
- 206. Pemerintah Kota Pekanbaru
- 207. Pemerintah Kab. Kampar
- 208. Pemerintah Kab. Tangerang



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah." -Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



- 209. Pemerintah Kab. Nganjuk
- 210. Pemerintah Kab. Lampung Utara
- 211. Pemerintah Kab. Magelang
- 212. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
- 213. Pemerintah Kab. Pangandaran
- 214. Pemerintah Provinsi Bengkulu
- 215. Pemerintah Kab. Simeulue
- 216. Pemerintah Kota Pasuruan
- 217. Pemerintah Kota Tangerang
- 218. Pemerintah Kab. Muaro Jambi
- 219. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
- 220. Pemerintah Kab. Rokan Hulu
- 221. Pemerintah Aceh
- 222. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 223. Pemerintah Kab. Sintang
- 224. Pemerintah Kab. Sukoharjo
- 225. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
- 226. Pemerintah Kab. Tegal
- 227. Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
- 228. Pemerintah Kab. Pamekasan
- 229. Pemerintah Kab. Aceh Utara
- 230. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
- 231. Pemerintah Kota Kediri
- 232. Pemerintah Kab. Pekalongan
- 233. Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
- 234. Pemerintah Kota Sawahlunto
- 235. Pemerintah Kota Sungai Penuh
- 236. Pemerintah Kab. Pemalang
- 237. Pemerintah Kab. Sanggau
- 238. Pemerintah Kab. Kerinci
- 239. Pemerintah Kota Cirebon
- 240. Pemerintah Kab. Sidoarjo
- 241. Pemerintah Kab. Kendal
- 242. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
- 243. Pemerintah Kota Depok
- 244. Pemerintah Kab. Sampang
- 245. Pemerintah Kab. Pesawaran
- 246. Pemerintah Kab. Jepara
- 247. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
- 248. Pemerintah Kota Semarang
- 249. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 250. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
- 251. Pemerintah Kab. Bondowoso
- 252. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
- 253. Pemerintah Kab. Pacitan
- 254. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 255. Pemerintah Kota Bogor
- 256. Pemerintah Kab. Bandung Barat
- 257. Pemerintah Kab. Tanah Datar
- 258. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
- 259. Pemerintah Kab. Mojokerto
- 260. Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
- 261. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektrtonik yang diterbitkan BSrE.



Tanggal: 25 September 2025

262. Pemerintah Kab. Pasaman Barat

263. Pemerintah Kab. Mesuji

264. Pemerintah Kab. Pringsewu

-UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

